



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 917/IV/VII/2016

**DPR RI Minta Komitmen
Anggota KPI Terpilih**

**Pemerintah Harus Menangkan
Kepentingan Buruh Indonesia**

**DPR RI Minta Penjelasan Dirut Pertamina
Terkait Wacana Holding Dengan PGN**



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dan Pimpinan DPR RI

DPR RI Minta Komitmen Anggota KPI Terpilih

DPR RI menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pembacaan laporan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) oleh Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, di ruang rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).

Dalam laporannya Kharis, begitu ia biasa disapa, membacakan sembilan nama calon anggota KPI yang berhasil terpilih lolos uji kepatutan dan kelayakan oleh anggota Komisi I DPR RI, pada hari sebelumnya, Selasa (19/7) malam.

"Setelah rapat uji kepatutan dan kelayakan selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2016, Komisi I DPR RI melanjutkan dengan rapat intern Komisi I DPR RI dalam rangka memilih sembilan calon anggota KPI Pusat Periode 2016 - 2019. Rapat internal Komisi I DPR RI akhirnya memutuskan sembilan calon anggota KPI

Pusat melalui pemungutan suara, setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat," ujar Abdul Kharis dalam laporan yang dibacakannya di depan Rapat Paripurna.

Adapun kesembilan nama dari dua puluh tujuh calon anggota KPI yang lolos dan berhasil meraih suara terbanyak adalah sebagai-berikut, Nuning Rodyah, Sudjarwanto Rahmat Muhamad Arifin, Yulianre Darwis, Ubaidillah, Dewi Setyarini, H Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Agung Suprio.

Terhadap kesembilan calon anggota

KPI Pusat Periode 2016-2019 terpilih tersebut, Komisi I DPR RI minta komitmen dari calon anggota KPI tersebut untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan KPI sesuai peraturan perundang-undangan secara profesional dan bertanggung jawab. Serta senantiasa menjaga moralitas, integritas, dan independen, serta menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta bersedia bekerja secara penuh waktu dengan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas KPI.

Usai Politisi dari Fraksi PKS itu membacakan laporannya, Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon pun meminta persetujuan dari para anggota sidang atas laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPI tersebut.

Teriakan setuju dari para anggota sidang dan diikuti dengan ketukan palu dari Pimpinan DPR RI menandai telah disetujuinya calon anggota KPI terpilih tersebut, nama-nama tersebut akan diserahkan kepada presiden untuk kemudian diresmikan dan dilantik. ■

Pemerintah Harus Menangkan Kepentingan Buruh Indonesia

Isu mengenai membanjirnya buruh Cina di Indonesia, yang kembali menjadi perbincangan hangat dalam satu pekan terakhir, mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurut Fadli, isu buruh asal Cina merupakan isu sensitif yang harus disikapi secara hati-hati oleh pemerintah dan tidak boleh digampangkan.

“ Kita punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis Cina, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya isu mengenai buruh asing asal Cina merupakan isu sensitif. Pemerintah tidak boleh menggampangkan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi,” katanya dalam pernyataan persnya Senin (18/7), di Jakarta.

Menurut Fadli, ada tiga alasan kenapa soal tenaga kerja asing asal Cina ini tidak boleh digampangkan oleh pemerintah, sehingga isu itu kemudian tidak bisa lagi dianggap sebagai isu perburuhan semata, melainkan telah menjadi isu sosial, politik, dan keamanan.

"Pertama, dalam sejarah, kita punya pengalaman konflik etnis yang tidak menyenangkan yang kemudian menjadi luka kolektif bangsa. Kita tidak ingin soal buruh asing ini akan mengusik kembali konflik dan luka lama itu."

Kedua, sambung dia, isu mengenai buruh asing asal Cina ini muncul ketika perekonomian nasional kita tidak sedang baik-baik saja, dan angka ketimpangan ekonomi juga sedang buruk-buruknya, dimana indeks gini kita mencapai 0,45, yang merupakan angka terburuk sepanjang sejarah. Pemerintah mestinya sensitif mengenai hal ini.

"Jangan sampai pemerintah dianggap telah merampas kesempatan kerja bagi rakyatnya sendiri," tegasnya.

"Ketiga, RRC saat ini sedang menjadi sorotan dunia, terutama dalam persoalan konflik Laut Cina Selatan. Kita perlu menempatkan isu buruh asal Cina ini dalam konteks geopolitik dan geoekonomi juga, agar jangan sampai mengorbankan kepentingan nasional atau kepentingan strategis Indonesia," ujar Fadli, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Polkam ini.

Lebih jauh Fadli menyoroti keganjilan pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ini. "Menteri Tenaga Kerja menyatakan jika jumlah tenaga kerja asing cenderung turun. Ini kan aneh. Padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ. Apalagi, sebagaimana yang bisa dibaca dari berbagai berita, munculnya imigran-imigran gelap makin sering terjadi di Indonesia. Jangan sampai turunnya angka tenaga kerja asing yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja merupakan efek dari lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. Harus dicek benar itu," ungkap politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualitasnya memang tidak tersedia di dalam negeri. "Di

ASEAN saja, dalam MEA, kita punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan. Lha ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun atas ribuan buruh asal Cina yang kualitasnya hanya buruh angkut, penggali

tanah, tukang semen, atau tukang rumput," kata Fadli dengan nada risau.

"Sebagai investor, Cina hanya merupakan negara



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

dengan investasi terbesar kesembilan saja di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, kredit dari Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda. Tapi anehnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh Cina, hingga 23 persen. Dari sisi politik dagang, sudah jelas Cina lebih diuntungkan daripada kita," tambahnya.

Fadli kemudian mengingatkan jika investasi asing secara konservatif mestinya bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Apalagi, menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia semakin meningkat. "Saya pernah membaca jika ada sebuah pabrik yang 90 persen tenaga kerjanya berasal dari Cina. Itu kan kebijakan yang tidak benar," tutup Fadli. ■

(mp), foto: Andri/rmr

BULETIN PARLEMENTARIA



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI - RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI -RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdiorhman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sullistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Ariandya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djujiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE, M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Muriyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) | ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN |

Jadikan Polri Pemikul Beban, Bukan Bagian Beban Nasional

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, kepolisian harus menjadi pemikul beban nasional bukan menjadi bagian dari beban nasional. Demikian diungkapkan politisi Fraksi PKS ini saat menyampaikan harapannya kepada Kapolri baru Jenderal Pol Tito Karnavian.

“ Fokus pada kesejahteraan polisi.

Polisi harus disehatkan secara mental dan juga finansial sehingga dia juga menjadi pemikul beban nasional bukan menjadi bagian dari beban nasional,” ungkap Fahri Hamzah saat bersilaturahmi dengan para Wartawan Koordinatoriat DPR RI di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/07).

Politisi dari Dapil NTB ini juga mendorong Tito Karnavian sebagai Pimpinan Polri baru untuk melakukan beberapa tindakan yang bisa meng-cover citra buruk kepolisian di mata publik. Salah satunya dengan mengangkat isu korupsi sebagai fokus utama di lembaga penegak hukum tersebut.

"Saya tidak setuju karena ada KPK, kepolisian justru menganggap isu korupsi itu sampingan. Apalagi karena Pak Tito ini dikenal sebagai orang densus, lalu



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama sejumlah Wartawan di DPR RI

kepolisian kerjanya ngurusin teroris saja. Menurut saya, karena terorisme itu adalah kejahatan senjata, teroris sebagai teror bersenjata, maka lebih cenderung kepada operasi intelijen dan mobilisasi kekuatan militer," jelas Fahri.

Ia juga berharap dengan mengangkat

korupsi sebagai salah satu isu utama di kepolisian akan mampu memulihkan kembali citra lembaga penegak hukum tersebut di mata masyarakat yang selama ini beranggapan seolah-olah polisi menjadi bagian dari korupsi.

Menurutnya, hal itu perlu disosialisasikan untuk reformasi kelembagaan secara lebih komprehensif. "Ini penting, kita ingin masyarakat memberikan apresiasi kepada kepolisian secara lebih baik," tekan Fahri.

"Saya terus terang suka gemas kalau polisi itu dianggap seolah-olah tidak bisa memberantas korupsi karena dianggap sapu kotor, padahal penyidik KPK itu adalah 100 persen dari polisi. Tolong Pak Tito ambil alih isu pemberantasan korupsi, bikin densus pemberantasan korupsi bahkan harus lebih besar daripada densus antiteror," imbuhnya. ■

(anm.npr), foto: Rumi/innr

Pimpinan DPR RI Terima Delegasi Keluarga Pasien Korban Vaksin Palsu

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua Korinbang Agus Hermanto, Wakil Ketua Korkesra Fahri Hamzah, Wakil Ketua Korpolkam Fadli Zon, dan Ketua Komisi IX Dede Yusuf, serta anggota Komisi IX John Kenedy Azis, menerima Delegasi Keluarga Pasien Korban Vaksin Palsu RS. Harapan Bunda dan RS. Mutiara Bunda, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/07).



Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima dokumen dari perwakilan keluarga pasien korban vaksin palsu

“ Setelah mendengarkan pernyataan sikap dari aliansi orang tua korban vaksin palsu, maka DPR RI akan segera dan langsung akan bertindak, meski sebelum telah melakukan langkah-langkah terutama oleh Komisi IX dibawah pimpinan Pak Dede Yusuf. Yang pasti kita harus mendorong pemerintah, karena masalah ini sudah sangat

krusial dan sangat genting,” ujar Ade Komarudin.

Seharusnya, lanjut dia, Rumah Sakit baik negara maupun swasta di perintahkan untuk membuat krisis center, itu yang penting dahulu untuk dilakukan secara organisasi. Dan secara nasional harus dipimpin langsung oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam hal itu, untuk bagaimana mengatasi masalah ini terlebih dahulu sebelum masalah-masalah yang lainnya.

"Masalah vaksin palsu ini setelah diteliti oleh kami, ternyata terkait dengan pihak-pihak lain. Yang kita tahu kita harus berurusan dengan BPOM, kemudian terkait dengan tata niaga vaksin, yang ujung-ujungnya terkait juga dengan BUMN yang bertanggungjawab atas pengadaan vaksin. Kita harus tahu dahulu akar masalahnya dimana, kita sekarang berikan kesempatan kepada Komisi IX untuk menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komisi IX. Dan

bila memang diperlukan Komisi IX membuat Panja, dan jika masih dirasa belum cukup juga, bila perlu kita buat Tim Pengawasan DPR RI karena ini menyangkut lintas Komisi," tegas pria yang akrab di sapa Akom tersebut.

Menurutnya, kalau Panja Komisi IX pasti terkait dengan urusan kesehatan, namun karena sudah menyangkut BUMN dan badan usaha milik negara dan lain-lain, maka DPR RI juga akan melibatkan Komisi yang lain.

"Kita juga ingin agar Kepolisian RI segera menindaklanjuti hal ini, dan menindak tegas siapa sebenarnya biang kerok dari pengadaan vaksin palsu yang membuat heboh secara nasional ini. Harus dilakukan langkah-langkah serius, karena menyangkut generasi penerus bangsa, dan menyangkut anak-anak dan cucu-cucu kita, serta menyangkut masa depan negara. Jadi jangan dianggap sebagai masalah yang sangat pribadi, ini soal kualitas masa depan bangsa" ucapnya. ■

(depmp) Foto: Icarus/jk

DPR RI Sepakat Lindungi Generasi Muda dari Nikotin

Sejatinya ada persamaan pandangan dan tujuan antara DPR RI dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Jantung Sehat yang ingin menyelamatkan generasi muda dari zat adiktif Nikotin yang ada pada tembakau.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI, Ade Komarudin saat menerima Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Jantung Sehat, di ruang tamu pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/7).

"Hari ini Kami (pimpinan DPR RI-red) menerima Profesor Emil Salim beserta rombongan yang tergabung dalam Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Jantung Sehat yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait RUU Pertembakauan (sebenarnya nama RUU itu sendiri belum final-red) yang tengah digodok di Badan legislasi (Baleg) DPR RI," ujar Ade didampingi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, Pimpinan Baleg dan Pimpinan Komisi IX DPR RI.

Pada kesempatan itu Emil Salim yang merupakan Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Jantung Sehat itu mengungkapkan ketidaksetujuannya rencana penyusunan RUU Pertembakauan. Ia berharap agar rencana itu tidak dilanjutkan. Alasannya tidak lain karena RUU tersebut akan semakin meningkatkan industri rokok. dan pada akhirnya akan semakin meracuni generasi muda.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan bahwa dalam membuat sebuah produk undang-undang, DPR RI tidak boleh



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersalaman dengan Prof. Emil Salim

bersifat diskriminatif. Artinya DPR RI akan terus menyelamatkan generasi muda dari zat adiktif, nikotin yang ada pada produk tembakau. Namun di sisi lain, ada banyak tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari industri pertembakauan.

Sementara itu Ketua Baleg DPR RI, Supratman mengatakan bahwa sejatinya segala aspirasi yang disampaikan oleh Komnas Pengendalian Tembakau itu sudah diakomodir dalam RUU tersebut. Undang-undang ini ditujukan untuk mengendalikan industri pertembakauan dalam negeri. Karena saat ini komposisi industri

pertembakauan dalam negeri memiliki komposisi 60 untuk industri tembakau impor dan 40 persen untuk tembakau asli Indonesia. Bukan tidak mungkin produk tembakau impor akan semakin meningkat. Hal ini tentu akan merugikan pertembakauan dalam negeri. Tidak hanya itu, kesehatan generasi muda

pun semakin tidak terlindungi.

"Jadi RUU ini untuk mengendalikan pertembakauan dalam negeri, selain agar tidak semakin didominasi tembakau impor juga tentu untuk melindungi generasi muda dari zat adiktif nikotin. Semua aspirasi Komnas Pengendalian Pertembakauan sebenarnya sudah diakomodir dalam draft RUU ini. Untuk namanya sendiri masih bisa berubah, karena sampai saat ini masih dalam tahap harmonisasi. Kami akan meminta masukan dari pihak-pihak lain ke depan," pungkas Supratman. ■

(anu.sj) foto: Rumi dan kreano/br

Krisis Center Vaksin Palsu Harus Segera Dibentuk

Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto meminta agar masalah vaksin palsu segera ditindaklanjuti dan diatasi dengan secepatnya, mengingat masalah vaksin palsu ini sudah menjadi masalah sangat serius yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ia juga meminta agar krisis center segera dibentuk di lokasi yang terindikasi adanya vaksin palsu itu.

“ Karena ini sifatnya *urgent*, maka krisis center juga harus secepatnya disampaikan kepada Kemenkes. Dan ditempatkan di lokasi yang sekarang di indikasikan ada vaksin palsu tersebut,” jelas Agus Hermanto saat menerima Aliansi orang tua korban vaksin palsu RS Harapan Bunda dan RS Mutiara Bunda, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/07).

Terkait masalah vaksin palsu ini, Agus Hermanto juga menyatakan bahwa DPR RI akan segera mengambil sikap agar masalah tersebut dapat segera diatasi dan dicarikan solusi yang terbaik bagi kepentingan seluruh masyarakat.

“Tentunya apa yang telah disampaikan ini akan segera

ditindaklanjuti, sebab sudah saatnya bagi Komisi IX untuk mengambil langkah seperti membat Pansus atau P a n j a ,

sehingga dapat segera teratasi secara secepatnya,” ucapnya.

Adapun maksud kedatangan aliansi orang tua korban vaksin palsu ke DPR RI adalah untuk mengadu atas masalah yang telah mereka hadapi, karena menurut mereka hanya DPR RI lah tempat pengaduan terakhir bagi mereka di Republik ini. Karena pada waktu sebelumnya mereka merasa dipersulit untuk menemui Presiden.

“Kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Pimpinan dan para anggota Dewan sekalian, karena hanya DPR RI lah tempat terakhir kami mengadu,” ungkap salah seorang perwakilan orang tua korban vaksin palsu yang hadir. ■



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

(dep.mp), foto: Iwan/mr.

Dubes AS Pamitan kepada Ketua DPR RI

Ketua DPR RI Ade Komarudin menilai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Orris Blake telah berhasil dalam menjalankan tugasnya menjembatani hubungan kedua negara. Apresiasi ini disampikannya saat menerima kunjungan Robert yang sekaligus berpamitan mengakhiri masa tugasnya di Indonesia.

“ Kita menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan pak Dubes, beliau mampu memberikan penguatan terhadap hubungan antara Indonesia - Amerika Serikat dengan baik, sama sekali tanpa cacat,” ungkap Ade Komarudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/07).

Menurut Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, Robert merupakan sosok yang bersahabat dan telah banyak memberikan pemahaman tentang kemajemukan agama maupun etnik di Indonesia.

“Sepanjang menjadi dubes, beliau melakukan banyak kunjungan ke berbagai daerah, bersahabat dengan banyak kalangan di Indonesia dengan aliran-aliran agama baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut



Ketua DPR RI Ade Komarudin menyerabkan cenderamata kepada Dubes AS

Akom, juga sempat membahas beberapa hal yang menjadi *concern* kedua negara, antara lain penanganan aksi terorisme, kolusi dan narkoba.

“Tadi kita berbicara lebih banyak soal bagaimana menangani terorisme, saya sampaikan kita juga terbuka untuk masukkan dari Dubes AS tentang substansi UU Antiterorisme,” jelasnya.

Politisi Golkar itu juga berjanji akan menyelesaikan pembahasan RUU tentang Antiterorisme setidaknya pada bulan Oktober ini tanpa menampilkan substansinya, meskipun disinyalir akan menimbulkan banyak pro dan kontra dalam perdebatannya di Parlemen.

“Lebih cepat lebih baik karena substansi itu tergantung dinamika perdebatan di parlemen antara pemerintah dan DPR RI, serta masukkan dari masyarakat akan menjadi perhatian kita juga,” papar politisi dapil Jawa Barat VII ini.

Dalam kesempatan tersebut, Robert memperkenalkan Wakil Duta Besar AS Brian McFeeters yang akan menggantikan posisinya sementara waktu. Sementara itu, berkenaan dengan pengganti Robert, Akom beranggapan siapapun penggantinya pasti yang terbaik dan sangat mengerti tentang Indonesia.

(amr.mp), Foto: Rani/jk

DPR RI Apresiasi Keberhasilan Satgas Tinombala

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Tinombala yang telah melumpuhkan Santoso, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT), di pegunungan Tambarana, Poso, Sulawesi Tengah.

Akom, panggilan akrab Ade Komarudin mengatakan, cara cerdas yang dilakukan Satgas Tinombala adalah dengan mengunci pergerakan kelompok teroris paling dicari itu di pegunungan wilayah Sulteng.

"Kami sudah tahu langkahnya sistematis. Dengan cara mengurung, menutup akses Santoso dari area kekuasaannya. Sehingga mereka tidak ada akses mendapat logistik. Istilah saya pakai sistem pagar besi. Karena itu kita berikan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian dan TNI," kata Akom di Gedung DPR

RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Politisi F-PG itu menyebut operasi Satgas Tinombala merupakan langkah strategis, yang cepat atau lambat akan menangkal Santoso dan jaringannya. Ia juga mengingatkan, akar masalah terorisme harus diketahui. Mengingat agama mengajarkan kedamaian dan tidak mengajarkan radikalisme.

Di sisi lain politisi asal dapil Jawa Barat itu menilai dengan dilumpuhkannya Santoso, tidak berarti jaringan teroris di tanah air terputuskan begitu saja. Sebab, urusan terorisme menurutnya tidak seperti



Ketua DPR RI Ade Komarudin

kasus vaksin palsu yang sedang ditangani Bareskrim Polri.

"Karena itu persoalan ini juga harus diminimalisir melalui pendekatan ideologi dan pendidikan agama," imbuhnya. ■

(g), foto: Iwan/jk

Undang-undang Harus Bisa Tekan Impor Tembakau

Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar RUU Pertembakauan harus mampu menekan impor tembakau.

Hal tersebut diungkapkan se usai mendampingi Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima audiensi Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Yayasan Jantung Indonesia, Senin(18/07).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pimpinan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Emil Salim dan sejumlah delegasi dari Yayasan Jantung Indonesia. Sementara itu Pimpinan DPR RI lain yang hadir yaitu Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi juga Pimpinan Baleg DPR RI, Pimpinan Komisi IX DPR RI dan Pengusul RUU Pertembakauan.

Fahri menjelaskan, dalam audiensi tersebut, disampaikan ada kekhawatiran bahwa RUU Pertembakauan akan membawa kepentingan Industri rokok dan merugikan petani tembakau.

"Komnas tadi menyampaikan hasil risetnya bahwa RUU ini berpeluang akan meningkatkan industri semata, membuat pasar rokok di dalam negeri semakin masif dan dikhawatirkan akan merusak generasi muda", ungkap Fahri.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Fahri mengatakan, "Saya mengusulkan bahwa Undang-undang ini pertama-tama harus



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah beraudiensi dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Yayasan Jantung Indonesia

meningkatkan kesejahteraan petani. Kedua, UU ini harus mengembangkan rokok tradisional Indonesia yaitu rokok kretek. Bukan malah mengembangkan Rokok Industri yang dibuat dengan mesin-mesin sehingga harganya murah, lalu gampang dibeli. Ketiga, UU ini harus mempersulit penjualan dan distribusi rokok di dalam negeri," jelasnya.

RUU Pertembakauan memang santer menuai pro dan kontra. Kalangan LSM dan kubu anti tembakau mengkritik rancangan

undang-undang tersebut yang dianggap menguntungkan industri tembakau dan merugikan kesehatan masyarakat. Sementara kalangan industri rokok malah menganggap bahwa RUU tersebut bisa menyulitkan industri rokok. Terkatung-katung selama 10 tahun, RUU Pertembakauan masuk lagi Prolegnas tahun 2016.

Menanggapi hal tersebut, Fahri menandakan jika tidak disetujui nama undang-undang tersebut bisa diganti menjadi Undang-Undang Pembatasan atau Pengendalian Konsumsi Tembakau.

"Undang-undang ini menekankan bahwa tembakau sebaiknya tidak diimpor, kepentingan petani menjadi prioritas kita", lanjut Fahri. Hal ini karena data BPS saat ini menunjukkan bahwa Impor tembakau mencapai angka 80 % dari total tembakau yang beredar. "Di hulu, DPR RI ingin menekan impor tersebut, agar petani bisa lebih sejahtera. Sementara di hilir, kita ingin konsumsi rokok dalam negeri dikurangi, sebab bisa merusak kesehatan masyarakat", pungkas Fahri. ■

(aka/mp) foto: Iwan/jk

DPR RI Berharap Penangkapan Santoso Sudahi Perlawanan Kelompok Teroris

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap penangkapan, sekaligus telah ditembak matinya Santoso, pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), menyudahi perlawanan kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia. Ia menegaskan tak ada tempat bagi terorisme di Tanah Air.

“ Dari beberapa kejadian terakhir, secara global, bisa dilihat yang jadi korban tidak hanya non-muslim saja. Di Prancis ada muslim pakai jilbab jadi korban, termasuk di Belgia dan Indonesia juga demikian. Mereka (teroris,-RED) pada dasarnya bukan Islam, tapi pemecah belah Islam, dengan mendiskreditkan Islam. Islam itu kan rahmatin lil alamin,” tegas Taufik, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Politisi F-PAN itu mengatakan tak ada agama yang mengajarkan terorisme. Dia berharap kematian Santoso menyadarkan kelompok teroris lain agar segera bertobat.

“Marilah kita saling mawas diri menjaga lingkungan kita. Sekarang katanya jaringan Santoso tinggal 19 orang, kami harapkan bisa kembali

ke jalan yang benar, sedapat mungkin bisa bertobat, atau kita tindak tegas!” kembali Taufik menegaskan.

Di satu sisi, politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas (Satgas) Tinombala dalam melumpuhkan Santoso di pegunungan Sulawesi Tengah.

“DPR RI mengapresiasi kerja keras dari seluruh prajurit polisi dan TNI yang di-BKO-kan di operasi Tinombala, yang berhasil melumpuhkan, menembak mati Santoso,” imbuh Taufik. ■



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Produksi Kelapa Belum Dioptimalkan



Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra

Indonesia memiliki luas lahan perkebunan dan produksi kelapa terbesar di dunia. Namun, produksi kelapa belum dioptimalkan dengan baik, sehingga produktifitasnya rendah. Imbasnya, potensi besar kelapa belum bisa menjadi komoditas ekspor.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra dalam seminar bertema 'Selamatkan Kelapa Indonesia' di Operation Room, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/7). Hadir dalam seminar ini sebagai pembicara, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, dan penulis buku 'Selamatkan Kelapa Indonesia', Ardi M. Simpala.

"Padahal kalau kita pelajari dengan baik, kelapa ini bisa menjadi komoditas ekspor. Dan bagian-bagian dari kelapa

bisa diolah, bisa dikembangkan menjadi komoditas yang laku di pasar internasional. Saya sudah mempraktekannya dari zaman kuliah dulu sampai sekarang," kata Eka.

Politisi F-PG itu juga yakin, jika potensi kelapa yang besar ini dapat dikelola dengan baik, maka lapangan kerja dan devisa negara juga akan bertambah, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Namun ia menyayangkan, masih ada beberapa permasalahan sehingga pengembangan potensi kelapa ini menjadi terhambat. Salah satunya adalah masalah harga. Ia mencatat, harga komoditas di negara tetangga, dihargai sebesar Rp3000-4000 per kilogram. Sementara di Indonesia hanya Rp1500-2000 saja untuk setiap 1 kilogram kelapa.

"Kita belum mengembangkan industri yang mengolah kelapa, sehingga sebagian besar kelapa ini dijadikan konsumsi. Padahal negara lain, seperti Malaysia, Thailand, sudah mengolah kelapa menjadi komoditas industri, sehingga harga lebih mahal. Ini yang menyebabkan petani atau pengusaha kelapa lokal, lebih tertarik menjual kelapa ke luar negeri," papar Eka.

Mengingat besarnya potensi kelapa ini, Eka menyarankan kepada Pemerintah untuk, misalnya, membentuk badan pengelolaan kelapa. Pasalnya, di beberapa negara bahkan sudah memiliki menteri khusus yang menangani kelapa.

"Mau tidak mau tanggung jawab kita adalah bagaimana membuka pengelolaan kelapa ini menjadi komoditas ekspor, sehingga permintaan kelapa untuk menjadi

komoditas ekspor dapat terpenuhi," pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan mengungkapkan beberapa permasalahan di kebun kelapa, diantaranya serangan hama, kebun kelapa tua, hingga rusaknya trio tata air. Alternatif penanganan masalah tentunya dengan pengendalian hama terpadu, peremajaan kebun kelapa, dan pembangunan dan rehabilitasi trio tata air (tanggul, saluran, dan pintu klep).

"Harga kelapa juga sangat tidak stabil, mudah naik turun. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian," imbuhan Wardan.

Wardan juga mencatat, dari tahun 2005-2015 Indonesia baru meremajakan 7.260 hektar kebun kelapa, dari total lebih dari 100 ribu hektar kebun kelapa tua. ■

(Sf) Foto: Andriybr

Komisi I Pilih Sembilan Nama Anggota KPI

Setelah melakukan rapat intern Komisi I DPR RI akhirnya menetapkan sembilan nama Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019. Penetapan ini diumumkan di depan awak media di ruang rapat Komisi I Gedung Nusantara II DPR RI.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari didampingi para Wakil Ketua Komisi menjelaskan, penetapan ini telah melalui musyawarah, namun tidak menemukan kata mufakat dan akhirnya dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

"Memutuskan sembilan calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 berdasarkan suara terbanyak. Setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah mufakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 287 tata tertib DPR RI," jelas Kharis, Selasa malam (19/7).

Sembilan nama terpilih Anggota KPI Pusat periode 2016-2019 akan disampaikan oleh Komisi I DPR RI pada Rapat Paripurna Rabu 20 Juli 2016. Memilih sembilan nama dari 27

calon komisioner KPI tersebut berdasarkan tiga indikator, yakni integritas, wawasan serta kemampuan,

Pariela, dan Agung Suprio.

Komisi I DPR RI selama dua hari telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019, berdasarkan penugasan rapat konsultasi pengganti Bamus DPR RI tanggal 14 Juli 2016. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada



Pimpinan Komisi I DPR RI mengumumkan sembilan nama Anggota baru KPI

dan kepribadian.

Sembilan komisioner terpilih tersebut adalah Nuning Rodyah, Sudarwanto Rahmat Muhammad Arifin, Yuliandrie Darwis, Ubaidillah, Dewi Setyarini, H Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Hardly Stefano Fenelon

tanggal 18 sampai 19 Juli 2016 dengan mengacu pada Undang-undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan DPR RI No I tentang tata tertib berupa keputusan rapat interen Komisi I DPR RI tanggal 28 Juni 2016. ■

(eko.mp) foto: Rizkaumar

Dewi Aryani dan Andreas H. Pariera Dilantik Jadi Anggota DPR RI

Rapat Paripurna DPR RI ke 33 Masa Sidang V Tahun 2015-2016 meresmikan dua Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua Anggota DPR RI, yaitu Damayanti Wisnu Putranti dan Honing Sani. Adapun posisi Damayanti digantikan Dewi Aryani dan posisi Honing Sani digantikan Andreas Hugo Pareira.

Keduanya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. Keputusan dan pelantikan kedua anggota pengganti antar waktu (PAW) itu dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memimpin rapat paripurna tersebut.

Fadli Zon pun berharap dengan adanya anggota yang baru dilantik ini dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan mampu memperkuat tugas legislatif.

"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat dengan anggota yang baru dilantik. Semoga dengan bergabungnya saudara akan lebih memperkuat tugas-tugas konstitusional dewan," ujarnya di Rapat Paripurna Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).

Pengambilan sumpah jabatan



Prosesi sumpah jabatan PAW Anggota DPR RI Dewi Aryani dan Andreas Hugo Pareira di pimpin langsung oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin

dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin dan disaksikan langsung oleh Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut. "Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa," ujar Akom membacakan naskah sumpah pelantikan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya menjadi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat," ujar kedua Anggota Dewan yang sedang dilantik serentak. Setelah pembacaan sumpah selesai, pimpinan DPR RI secara bergantian memberikan salam tanda ucapan selamat kepada kedua Anggota Dewan PAW.

Sebagaimana diketahui, Dewi Aryani adalah mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014. Sebelumnya ia juga tercatat sebagai penerima program Fellowship MIT

(Massachusetts Institute of Technology) Sloan Management, Cambridge, Amerika Serikat. Selain itu Andreas Hugo Pareira adalah lulusan Doktor Politik Internasional dari Universitas Giessen, Jerman. Sebelumnya dikenal sebagai dosen di FISIP Universitas Parahyangan. ■

(b.smp) foto: Juyadi/fk

Pemerintah Ceroboh Buka Brebes Exit Timur dan Pantura

Insiden kemacetan yang luar biasa sepanjang arus mudik kemarin, menuai komentar negatif bagi pemerintah. Sumber kemacetan adalah kecerobohan Presiden Jokowi membuka jalur keluar di Brebes Timur atau yang lebih populer dengan Brexit dan di Pantura.

Pembukaan jalur itu, menciptakan kemacetan di pertigaan exit timur Brebes. "Seharusnya Brexit dibuat jalan layang yang tidak menghambat jalur Pantura. Jalur Brexit yang diresmikan 16 Juni 2016 lalu oleh Presiden Jokowi tidak dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah," tandas Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Kamis (14/7).

Koordinasi dan sinergi selama arus mudik berjalan juga dinilai minim antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pengelola jalan tol, kepolisian, dan Kemenhub.

Menurut Bambang, mestinya BPJT membuat standardisasi terlebih dahulu sebelum membuka jalur, agar diketahui volume kendaraan yang masuk, sehingga tidak terjadi *overload* atau *overdemand*.

"Secara eksternal, pemerintah harus bisa mengatur *origin and destination* dari pemudik. Asal pemudik harus didata oleh Kemenhub, sehingga bisa memberikan pengarahan kepada pemudik untuk menggunakan jalur alternatif seperti jalur tengah, utara, dan selatan. Penumpukan kendaraan pun tidak akan terjadi. Kemenhub juga bisa dibantu Dishub daerah, agar *overload* kendaraan bisa diatur maksimal," ungkap Bambang.

Ditambahkan politisi Gerindra ini, Kemenhub juga harus merancang transportasi publik super massal seperti

kereta api yang saat ini jumlahnya sangat minim. *Double track* di utara juga mestinya bisa untuk antisipasi. Jumlah penduduk di Pulau Jawa yang sekitar 100 juta harus sudah bisa diantisipasi seperti di Jepang. Pemerintah Jepang telah mendesain transportasi dengan moda kereta api berangkat setiap 5 menit.

"Kemenhub harus mempersiapkan transportasi super massal untuk antisipasi seperti kapal laut dan angkutan darat akibat padatnya transportasi privat. Pemerintah

pun harus mengatur tata letak bangunan dan fasilitas publik agar tidak



Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono

bersentuhan langsung dengan jalan raya. Saatnya pula mengantisipasi lintas

telah merugikan masyarakat pengguna jalan tol. ■

sebidang jalan raya dan kereta api. Sebaliknya, harus mulai dibangun *underpass* atau jalan layang agar tidak terhambat," papar Bambang.

Melihat fakta kemacetan yang luar biasa selama arus mudik, publik pengguna jalan tol sebenarnya sudah dilindungi oleh UU Jalan Tol. Pasal 92 UU ini menyebutkan, pengelola jalan tol wajib memberi ganti rugi yang diderita pengguna jalan tol akibat kesalahan badan usaha dalam mengelola jalan tol. Kemacetan yang mengular itu

Pengelolaan Dana Desa Harus Disempurnakan

Dana desa yang diprogramkan oleh pemerintah masih dalam tahap introduksi, maka sudah semestinya pemerintah mencari formula pengelolaan yang baik dan pas. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.

Argumen tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji saat rapat panitia kerja kebijakan transfer dana pusat ke daerah dan dana desa dengan pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Kementerian Keuangan RI.

"Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju. Tolong ini disempurnakan lagi, agar lebih merata, sehingga tercapainya pemerataan pembangunan," ujar Sirmadji di ruang rapat Nusantara II, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/7).

Baginya pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi adalah upaya pembangunan yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. "Pemerataan pembangunan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara di seluruh tanah air," ujar Sirmadji.

Pemerataan pembangunan, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat, serta mengembangkan kegiatan di semua aspek kehidupan. Pemerataan pembangunan juga mempercepat pertumbuhan kelompok

masyarakat, sektor, atau daerah yang tertinggal.

"Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah, dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal," tambahnya.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang lebih dapat menjamin kesinambungan karena didukung oleh peran serta aktif rakyat yang seluas-luasnya dan memanfaatkan potensi rakyat yang sebesar-besarnya. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menekankan tentang pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran.

Dia mengingatkan pemerintah agar jangan sampai dalam penyusunan anggaran

nasional hanya Jawa, Sumatera dan Bali saja yang diuntungkan. "Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju," tandas Sirmadji. ■



Anggota Banggar DPR RI Sirmadji

Kemenpolhukam Diminta Percepat Akselerasi Penegakan Karya Intelektual

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengusulkan agar Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM dapat mengakselerasi berbagai instansi untuk mempercepat penegakan karya intelektual di Indonesia.

Saya mendorong Kemenkopolkum sebagai *leading sector* untuk mengakselerasi berbagai instansi dalam melakukan penegakan hak cipta di Indonesia seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, termasuk Badan Ekonomi Kreatif dalam satu tim yang solid," ujar Anang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).

Politisi PAN ini menuturkan berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi selama dua tahun terakhir belum menunjukkan capaian yang berarti. Ia mencontohkan Penyidik PNS Kementerian Hukum dan HAM terkait penegakan karya intelektual, Satgas Penegakan Karya Intelektual yang diinisiasi Bekraf termasuk Polri belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.



Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah

"Berbagai upaya tersebut bagus, namun akselerasinya masih lemah. Harus didorong lebih cepat dan terarah lagi. Ini semata-mata untuk menjalankan visi Nawacita Presiden Jokowi yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung baru perekonomian kita,"

ujar Anang.

Lebih lanjut Anang menyebutkan tim dibawah pengawasan Kemenkopolkum tersebut dapat menjadi embrio untuk menjadi lembaga atau badan khusus yang menangani penegakan hak cipta. "Saya membayangkan tim itu diberi kewenangan yang *powerfull* melakukan penyelidikan, penyidikan dan sekaligus penuntutan khusus di bidang penegakan karya intelektual," papar musisi asal Jember ini.

Dia menegaskan penegakan karya intelektual menjadi bukti komitmen negara dalam mengapresiasi sekaligus melindungi ekonomi kreatif di Tanah Air. Penegakan karya intelektual, sambung Anang, merupakan syarat mutlak untuk terciptanya industri ekonomi kreatif yang mapan. "Apalagi kontribusi di sektor ini sudah nyata seperti tahun 2013 lalu, sumbangan di industri ekonomi kreatif dalam penerimaan negara mencapai Rp 642 triliun," pungkasan Anang. ■

(b.m.p), foto: Atzka/mir.

BNPP Ditantang Komisi II Segera Monitor Wilayah Perbatasan

Persoalan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara patut menjadi perhatian khusus pemerintah. Pasalnya, dua sungai di Kaltara, yaitu Sungai Sumantipal dan Sungai Sinapad diklaim menjadi milik negeri Jiran, Malaysia.

Tidak hanya mengklaim sungai milik Indonesia, Malaysia juga membangun bangunan di sungai tersebut. Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam Rapat Kerja dengan

Kementerian Dalam Negeri, Selasa (19/7).

Selain menyinggung sungai yang diklaim milik Malaysia, Hetifah juga menyampaikan adanya 28 Desa di Nunukan yang diklaim milik Malaysia. "Saat ini akan ada pemekaran daerah baru di Kaltara, yaitu Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan. Nantinya akan ada enam Kecamatan. Tapi iroisnya 28 desa di Kecamatan tersebut diklaim milik Malaysia," ujar Hetifah.



Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian

Dalam rapat tersebut, Hetifah juga menantang Mendagri, Tjahjo Kumolo untuk berkunjung ke daerah perbatasan di Kaltara. "Saya tantang Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) atau staf Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk melihat langsung kondisi di perbatasan sana," tegas Hetifah.

Hetifah menyampaikan kondisi masyarakat di daerah Krayan Kaltara yang serba terbatas dalam hal kebutuhan pokok. Menurutnya warga di sana saat ini sangat

bergantung pada kebutuhan bahan pokok kepada Malaysia.

"Kondisi ini dapat dapat menurunkan rasa nasionalisme warga di perbatasan," sambung politisi Partai Golkar tersebut.

Menurut Hetifah, masalah-masalah di wilayah perbatasan seakan menjadi masalah klasik yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah. "Saya sudah berkali-kali berkunjung ke sana (daerah perbatasan), bahkan Anggota Komisi II sudah

melakukan kunjungan kerja disana, tapi masalahnya tetap saja sama. Dari dulu sudah saya sampaikan di sana sangat minim sekolah, bahkan anak-anak yang berangkat sekolah harus menyeberangi sungai," keluhnya.

Selain menyampaikan kondisi yang memprihatinkan di wilayah perbatasan, ia juga menuntut segera diangkat status Kabupaten Sebatik untuk ditetapkan menjadi Kota Administratif. ■

(bs.mpr), foto: Rumi/mr.

Anggota DPR RI Tolak Impor Daging Kerbau

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo tidak sepekat dengan rencana Pemerintah (Kementerian Pertanian) untuk melakukan impor daging kerbau dari India sebagai langkah strategis agar daging sapi yang masih mahal di sekitar Rp100.000 segera turun di bawah Rp80.000.

Menurut Firman yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI, dirinya menolak kebijakan impor daging kerbau itu dengan alasan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan budaya konsumen di Indonesia. Di mana masyarakat selama ini lebih menikmati konsumsi daging sapi bila dibandingkan daging kerbau.

"Jika pemerintah ingin melakukan impor daging kerbau, harus betul-betul memenuhi sesuai mekanisme aturan yang ada. Selain itu, masyarakat Indonesia tidak biasa dengan makan daging kerbau. Budayanya kita bukan budaya

makan daging kerbau tapi makan daging sapi," kata Firman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/07).

Firman meminta Pemerintah menunda kebijakan itu. Karena tujuan pemerintah melakukan impor daging kerbau untuk meniadakan daging sapi belum bisa turun di harga Rp80.000. Menurut Firman, kebijakan itu sangat tidak benar, apalagi ingin menjadikan pasar Indonesia ingin seperti Malaysia. Padahal, lanjutnya, kebutuhan dan struktur pasar niaga daging di negeri Jiran



Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo

Malaysia dengan Indonesia sangat berbeda.

"Pemerintah selama ini tetap saja tak mempertimbangkan terhadap nasib para peternak-peternak lokal. Karena pada akhirnya nanti, ada pemaksaan kehendak dari pemerintah terhadap masyarakat yang terbiasa makan daging sapi untuk menkonsumsi daging kerbau. Toh, nanti mau tidak mau, suka tidak suka harus membeli daging kerbau," terangnya.

Politisi asal Pati, Jawa Tengah ini menilai, jika Kementan tetap memaksa melakukan impor daging kerbau tanpa

mempertimbangkan faktor sosiologi ekonomi penghasilan masyarakat di sejumlah daerah. Maka yang pertama dirugikan dari kebijakan itu adalah masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor peternakan.

"Tentunya, kebijakan ini akan mematikan posisi penghasilan petani lokal. Ini tak boleh dilanjutkan, karena ini siasat saja dari Kementan. Oleh karena itu kenapa pemerintah terlalu terburu-buru menyampaikan statemen menjungkir-balikan di bawah Rp. 80.000," terangnya.

Ketum Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) ini mengusulkan, sebelum pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan sebaiknya mempertimbangkan untung ruginya. Apalagi kebijakan itu bersentuhan langsung dengan dapur rakyat kecil.

"Saya meminta pemerintah, sebelum menyampaikan kebijakan ke publik seharusnya dilakukan hitung-hitung dulu secara teknis, mungkinkah hal itu dilakukan? Jangan sampai hanya mengatakan, bisa-bisa, dan bisa tapi kenyataannya di lapangan tak bisa. Ini akan mengecewakan rakyat," ujarnya. ■

(es), foto: Naeffarajimr.

Dunia Bisa Adopsi Filosofi Bhinneka Tunggal Ika

Keragaman etnis, bahasa, dan agama di Indoensia bisa disatukan dengan satu filosofi monumental, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Filosofi ini bisa diadopsi oleh dunia internasional untuk mempersatukan umat manusia di seluruh dunia.

Demikian disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Ethiopia untuk Indonesia di DPR RI, Selasa (19/7). "Alangkah indahnya, bila semua makhluk di dunia ini bisa hidup dengan tenang, berdampingan, damai, dan sejahtera," kata Nurhayati kepada pers usai pertemuan.

Apa yang disampaikan Nurhayati ini merupakan tanggapan atas isu terorisme yang terus memojokkan komunitas muslim di dunia. Padahal bila disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, semua isu terorisme bisa dinetralisir. Masyarakat dunia harus dilindungi dan dipersatukan dengan satu filosofi Binneka Tunggal Ika (unity in diversity). "Ada ketidakadilan soal terorisme. Ketika yang terbunuh orang Islam, si pembunuh hanya disebut kriminal biasa.



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf bersama Dubes Ethiopia Foto: Iwan/jk

Sebaliknya, ketika orang Islam pelakunya maka disebut teroris. Saya yakin Tuhan menciptakan dunia ini untuk seluruh umat manusia, meskipun dia tidak percaya pada tuhan, tapi dia juga berhak hidup di dunia ini dengan tenang," jelas Nurhayati.

Sementara itu, Dubes Ethiopia Arega

Haiku Teffera sangat tertarik dengan penjelasan Nurhayati tersebut. Ia juga berharap, antara Indonesia dan Ethiopia membentuk grup kerja sama parlemen untuk mempererat persahabatan. Indonesia sendiri sudah membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan Afrika sejak Konferensi Asia Afrika digelar pada 1955.

"Kita berharap kerja sama parlemen ini akan memperkuat *people to people context*. Beliau mengharapkan agar bisa segera terbentuk grup kerja sama bilateral ini," ujar Nurhayati lagi. Bila sudah terbentuk grup kerja sama parlemen antara Indoensia dan Ethiopia, diharapkan bisa membawa manfaat bagi kedua negara dan bermanfaat pula bagi kawasan regional masing-masing. ■

(mb. mp) Foto: Iwan/jk

Dubes Georgia Usul Bentuk GKSB

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan Duta Besar Georgia untuk Indonesia, Zurab Aleksidze, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/7). Dalam pertemuan ini, Dubes Georgia mengusulkan agar dibentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara kedua negara.

“ Dalam pertemuan ini, Dubes Georgia menekankan pada membangun Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia dengan Georgia. Namun karena Georgia sedang mempersiapkan pemilu, jadi akan dilaksanakan nanti,” kata Nurhayati, usai pertemuan.

Nurhayati mengakui, DPR RI memang sudah membentuk GKSB

dengan 59 negara sahabat. Namun ia mengingatkan, pembentukan GKSB bukan hanya sekedar untuk saling mengunjungi negara sahabat, namun juga memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Jadi hubungan GKSB harus membantu Pemerintah dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dan berdampak positif terhadap kesejahteraan

masyarakat.

"Setelah kita evaluasi, kami tidak ingin GKSB ini hanya sekedar saling mengunjungi, tetapi harus ada manfaatnya. Sehingga dalam periode ini dikurangi menjadi 49 negara. Kita berharap ini bisa efektif dan efisien untuk masyarakat Indonesia," tambah politisi F-PD itu.

Nurhayati menambahkan, kerjasama antara kedua negara ini juga jangan hanya berfokus pada peningkatan hubungan kerjasama semata, tetapi juga harus berpikir yang lingkup yang lebih besar, karena kedua negara menjadi komunitas global.

"Saya juga menekankan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini untuk semua orang, walaupun ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tapi dia

Irtama Setjen DPR RI dan Tim KemenPAN-RB Bahas Reformasi Birokrasi

Dalam rangka peningkatan kapabilitas kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha bersama tim evaluator KemenPAN/RB mengadakan *entry meeting* terkait evaluasi pelaksanaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/07).

“ Ada dua hal yang dibahas, yakni kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Jenderal,” papar Setyanta.



Inspektur Utama
Setjen DPR RI

Sebelumnya Irtama Setjen DPR RI sudah mengadakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai rekomendasi dari KemenPAN/RB. “Nah, itu yang nanti dilihat secara detil apakah hasil penilaian kita sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma yang dilaksanakan Kementerian PAN dan RB,” jelasnya.

Sedangkan berkenaan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, ia

menjelaskan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara IKU (Indikator Kinerja Utama) dengan *outcome*. “Jadi tekanannya itu sebetulnya akuntabilitas kinerja, bukan kinerjanya tetapi proses dalam melaksanakan kinerja,” ucap Irtama DPR RI.

“Indikatornya penilaiannya tidak hanya sekedar menyusun laporan, kemudian dinilai. Tetapi apa sebetulnya *outcome* dari pelaksanaan kinerja itu sehingga kedepan diarahkan perjanjian kinerja tidak hanya pada eselon 1 dan eselon 2 tetapi dari semua level tertinggi hingga terendah,” imbuhnya.

Menurutnya, hal tersebut perlu diterapkan untuk menghapus stigma tentang pegawai pemerintah yang selama ini kurang baik di mata masyarakat. “Ada pameo yang mengatakan 704 atau 805, artinya

jam 8 masuk, kemudian ditengahnya kosong atau tidak berkinerja dan jam 5 absen pulang dan mendapatkan tunjangan kerja. Nah ini kedepan memang harus dihapus sehingga harus 8105- jam 8 masuk, kinerja 10 dan jam 5 (17.00) pulang,” tegas Setyanta.

Sementara itu, Supervisor Tim Evaluator KemenPAN/RB Teguh Widjinarko mengatakan ada beberapa hal yang akan menjadi indikator dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja, antara lain perencanaan kinerja, evaluasi kinerja, peraturan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

“Kalau sudah semua itu, namun ada perbedaan penilaian nanti kita diskusikan untuk memperoleh titik temu. Kemudian kita finalkan dan ditetapkan sebagai penilaian akhir dari pelaksanaan reformasi di Setjen DPR RI. Diharapkan, Setjen DPR RI terus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota dewan maupun kepada masyarakat,” papar Teguh. ■



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf bersama Duta Besar Georgia

berhak hidup di dunia dengan aman dan sejahtera. Mengingat kejadian-kejadian sekarang seperti terorisme ini tidak harus dihubungkan dengan salah satu agama. Tetapi ini harus disikapi dengan bijak karena ada dan ada kepentingan-kepentingan,” papar Nurhayati.

Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai kerjasama pendidikan antara kedua negara. Duta Besar Georgia menginformasikan, Universitas Indonesia sudah menawarkan 5-6 beasiswa untuk pelajar Georgia.

“Dan yang sangat menarik dalam perbincangan ini bagaimana Georgia memberi kebebasan kepada media. Mereka mempunyai Undang-undang (UU). Namun yang membuat saya cukup terkejut bahwa pemilik media tidak boleh dari kalangan politisi. Media diberi kebebasan, tapi pemilik media sangat dibatasi,” imbuh politisi asal dapil Jawa Timur itu. ■

Anggota Komisi I Berharap Dewan Pers Tegas Tetapkan Fungsi Kode Etik

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno meminta Dewan Pers untuk tegas dalam menerapkan fungsi-fungsi kode etik. Hal tersebut diungkapkannya disela rapat Komisi I DPR RI dengan Dewan Pers, Kamis (14/7) di ruang rapat komisi I, Senayan, Jakarta.

“Sekarang Media sangat menentukan kebijakan dan pendapat publik. Oleh karena itu kami meminta agar Dewan Pers bisa tegas dalam menerapkan fungsi-fungsi kode etik Jurnalistik, agar media tidak kebablasan. Karena banyak juga berita-berita yang tidak seratus persen disiarkan tepat dan dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Dave, begitu ia biasa disapa.

Contohnya, lanjut Dave berita tentang terorisme dan kasus-kasus besar lainnya yang disiarkan begitu cepat sehingga ada *trial by Press* (peradilan oleh pers). Dengan begitu publik tidak melihat kebenaran seratus persen, hingga pada akhirnya publik cepat menentukan pendapat serta sikap, tanpa melihat fakta

yang sebenarnya terjadi.

Sebenarnya lanjut Dave, media abal-abal lah yang mengacaukan pandangan masyarakat dan pengetahuan masyarakat



Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno

tentang fakta yang sebenarnya. Mereka begitu cepat menyiarkan, menyebarkan berita tanpa melihat fakta yang sebenarnya, hanya demi kepentingan ekonomi sesaat, bukan untuk pengetahuan publik.

“Oleh karena itu kami berharap Dewan Pers dapat memberikan sanksi dan hukuman yang keras terhadap media-media seperti itu. Semua pers jika melanggar kode etik, mengganggu kenyamanan publik, dan melanggar undang-undang, baik itu undang-undang ITE, UU rahasia perbankan, jika semua itu dilabrak, maka harus ada sanksi pidana, sanksi sosial, dan tentu saja sanksi dan hukuman dari

dewan pers sebagaimana tugas dan fungsi dari Dewan Pers itu sendiri,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini. ■

(ayu), foto: Nagfuroji/nr.

Ancaman Genosida, Pembuat dan Penjual Vaksin Palsu Harus Dihukum Berat

Anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw menilai peredaran vaksin palsu yang terjadi di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jika hal ini dibiarkan, maka sama seperti genosida atau penghancuran sebuah generasi bangsa.

“Karena itu, Roberth meminta kepada pihak kepolisian serta Satgas Penanganan Vaksin Palsu untuk memberikan sanksi dan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku baik itu pembuat maupun penjual vaksin palsu. Sebab, pembuatan serta peredaran vaksin palsu secara masif yang terjadi sekarang ini sudah termasuk kejahatan yang sangat keji.

“Saya usulkan kepada Polri agar pelaku-pelaku ini diberi hukuman seberat-beratnya serta diberlakukan pasal berlapis. Karena ini perbuatan yang sangat keji. Dan bila dibiarkan ini bisa terjadi genosida, artinya kita bisa kehilangan satu generasi,” tegas Roberth.

Hal tersebut diungkapkan Roberth dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Satgas Penanganan Vaksin Palsu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).

Selain itu, Roberth juga mendesak kepada satgas Penanganan Vaksin Palsu dan BPOM untuk segera menginstruksikan kepada seluruh Balai Besar POM di setiap provinsi di Indonesia untuk melakukan penelitian dan investigasi lebih mendalam secara tuntas terhadap peredaran vaksin



Anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw

palsu. Sebab, saat ini vaksin palsu sudah tersebar di sembilan provinsi.

"Untuk menjawab kegelisahan vaksin palsu maka harus ada pemeriksaan menyeluruh di seluruh Indonesia dan tidak hanya di sembilan provinsi saja. Libatkan Balai Besar POM di setiap provinsi untuk mengungkap peredaran ini. Sehingga, ada jawaban pemeriksaan di 34 provinsi dan bagaimana hasilnya," tegas Roberth.

Ia juga menyarankan agar Satgas Penanganan Vaksin Palsu kembali memeriksa anak-anak yang telah melakukan vaksinasi di Rumah Sakit-

Rumah Sakit atau Fasyankes (Fasilitas dan Layanan Kesehatan) yang diduga menggunakan vaksin palsu untuk dilakukan pemeriksaan serta vaksinasi ulang. Sehingga, vaksinasi yang dilakukan sebelumnya tidak menjadi sia-sia.

"Selidiki masalah ini sampai tuntas. Kemenkes memiliki data lengkap anak-anak yang telah melakukan vaksinasi di rumah sakit, puskesmas, atau Fasyankes lainnya yang diduga menggunakan vaksin palsu. Periksa dan ambil *sample* anak-anak itu, jangan sampai anak-anak itu menjadi korban," ungkap Roberth.

Karena itu, Politisi asal Papua ini meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan serta BPOM untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kelalaiannya selama 13 tahun belakangan ini terhadap peredaran vaksin palsu.

"Harus ada permohonan maaf dari pemerintah. bukan malah masyarakat dibiarkan begini saja. Walau kita tahu Ibu baru jadi menteri, tapi ini negara. Siapapun yang menjadi pemimpin harus bertanggungjawab bagi negara," pungkasnya. ■

(b.s.mp), foto: Jayadi/mr.

Pemerintah Ragu Patok Asumsi Makro RAPBN 2017

Pemerintah dinilai ragu-ragu dan penuh kehati-hatian dalam mematok asumsi makro untuk RAPBN 2017. Ini semua lantaran kondisi ekonomi domestik dan global masih diselimuti ketidakpastian. Kematangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam memproyeksikan ekonomi ke depan. *Up date* data harus selalu dilakukan, agar ekonomi nasional tidak terus terjatuh.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan hal ini, Selasa (19/7). Banyak yang harus diperhatikan pemerintah dengan kenyataan yang ada. Misalnya, sebut Heri, BI rate masih tidak menentu karena terkait faktor eksternal. Inflasi masih di koridor 3-4%. Dan SBN kurang berpihak pada bisnis yang kondusif.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan perlambatan ekonomi Tiongkok, karena adanya *rapid aging society* (cepatnya peningkatan populasi usia tua). Masalah lainnya yang harus diperhatikan adalah potensi arus modal keluar dalam jangka pendek yang dipastikan segera menekan nilai tukar rupiah. Belum lagi risiko penyerapan anggaran yang kecil di daerah.

"Dengan keadaan seperti itu, ke depan perekonomian nasional tetap tidak akan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang nanti dihasilkan tidak akan mengubah apapun. Yang miskin tetap miskin. Yang rentan miskin sangat mungkin jatuh miskin. Untuk diketahui, saat ini, jumlah penduduk miskin sudah mencapai 28,51 juta orang atau sekitar 11,13%," papar politisi Gerindra ini.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyampaikan asumsi makro ekonomi

dalam RAPBN 2017 di hadapan Komisi XI DPR RI. Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%, inflasi 3-5%, nilai tukar rupiah dipatok Rp13.650-Rp13.900 per USD, dan SBN 5-5,5%. Menurut Heri yang paling realistis adalah pertumbuhan ekonomi 5,2-5,5%, inflasi 3-4,5%, nilai tukar rupiah Rp13.300-Rp13.500 per USD, dan SBN 5,0-5,5%. "Idealnya penyusunan RAPBN lebih realistis dan berdasarkan kondisi perkembangan ekonomi yang ada."

Pada bagian lain, Heri menjelaskan, angka pengangguran berpotensi terus meningkat hampir 8 juta orang. Pemerintah belum mampu membuka lapangan kerja baru. Bahkan, sebagian besar satuan bisnis termasuk UMKM telah melakukan efisiensi. Tak sedikit pula yang menutup usaha, karena tak sanggup lagi menanggung beban operasional. Apalagi, pasar kini masih lesu. Yang menyedihkan lagi, lapangan kerja yang tersedia mulai diisi oleh tenaga kerja asing.

"Pemerintah harus bekerja keras lagi dalam mendorong perekonomian nasional yang kuat dan punya dampak nyata

untuk kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai survei yang ada, mayoritas masyarakat menilai buruk kesejahteraan masyarakat pada pemerintahan Jokowi," ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.

Sementara itu, lanjut Heri, masyarakat yang tidak puas atas kinerja pemerintahan Jokowi di atas 50% dan terus meningkat sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu. Semua angka ini, kata Heri, merupakan refleksi atas kegagalan pemerintah menciptakan perekonomian nasional yang kuat. "Ini sudah waktunya menjadi

warning keras bagi pemerintah agar tidak santai," tutup Heri. ■

(mb), Foto: Arif/jk



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

DPR RI Minta Penjelasan Dirut Pertamina Terkait Wacana Holding Dengan PGN

Terkait adanya wacana *holding* PT. Pertamina (Persero) dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), Komisi VII DPR RI minta Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina Dwi Soetjipto untuk memberikan penjelasan.

Pemintaan Komisi VII tersebut disampaikan anggota Komisi VII saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina dan jajarannya, dipimpin Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/07). Anggota Komisi VII Satya W. Yudha (F-PG) menyatakan dengan adanya *holding* PT. Pertamina dengan PGN nantinya diharapkan ada materi presentasi yang cukup. Karena banyak sekali nantinya Komisi VII ingin mencari keuntungan disamping efisiensi.

"Kita harus nyata yaitu yang jatuh ke rakyat itu adalah mengenai harga, Kami berharap disamping efisiensi tentunya mudah-mudahan dengan adanya penyatuan seperti ini akan menimbulkan harga gas yang menjadi turun," papar politisi dari F-PG ini.

Menurutnya, kurangnya harga gas harus menjadi tujuan dari *holding*. Karena tidak ada artinya *holding* itu jika produk akhirnya tidak efisien dirasakan ataupun bermanfaat bagi masyarakat.

"Inilah yang ingin kita ketahui, apa sebetulnya arah kebijakan pemerintah. Jangan sampai nanti setelah *holding* kemudian dijual," mantapnya.

Anggota Komisi VII Tony Wardoyo (F-PDI Perjuangan) meminta waktu khusus untuk membicarakan masalah *holding* ini, karena hal ini sangat penting dan strategis menyangkut hal yang besar dan berimplikasi besar.

"Jangan sampai *holding* itu menjadi liar, karena ini milik negara harus 100% dimiliki oleh negara," tegasnya.

Sementara Harry Poernomo (F-Gerindra) menyatakan bahwa dari skema yang disampaikan Dirut Pertamina, bukan *holding* tapi Pertamina Merger dengan PGN. Pertamina mengakuisisi PGN.

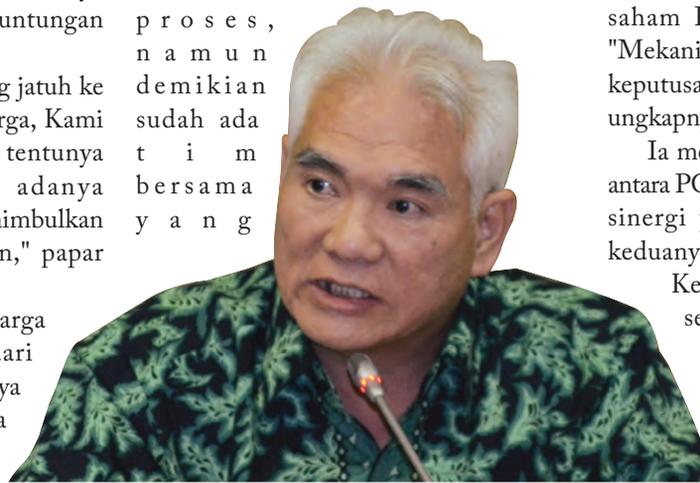
Sedangkan teman satu fraksi Harry,

Ramson Siagian menanyakan apakah *holding* ini masih wacana atau sudah *on process*.

Dijawab oleh Dirut Pertamina dalam rapat tersebut, bahwa langkah *holding* merupakan inisiatif dari pemegang saham Exxon. Dimana, Dwi mengaku, ada banyak mengaku hal postifi terkait *holding* ini.

"Saat ini perkembangan mengenai *holding* ini, Peraturan Pemerintahnya masih dalam

proses,
namun
demikian
sudah ada
tindakan
bersama
yang



Anggota Komisi VII Tony Wardoyo

dibentuk Kementerian BUMN yang melaksanakan langkah-langkah persiapan," jelas Dwi.

Rencananya, sambung Dwi, apa yang ditargetkan bisa menyatukan PGN dengan Pertagas. Dimana tentu saja masih ada beberapa *alternative* model. Salah satu *alternative* yang menarik adalah bagaimana saham negara yang ada di PGN bisa dikonsolidasikan dengan saham negara 100% yang ada di PT. Pertamina. Selanjutnya, tegasnya, adalah bagaimana saham Pertagas dan PGN menyatu. "Mekanisme ini, kami masih menunggu keputusan terhadap *stake holder* Exxon," ungkapnya.

Ia melaporkan, perjalanan selama ini antara PGN dengan Pertagas, banyak sekali sinergi yang bisa dibangun diantara keduanya. Studi yang sudah dilakukan Kementerian BUMN, bahwa ada sekitar 1,5 Milyar US \$ efisiensi yang dibangun dari investasi.

Dwi berjanji akan memberikan penjelasan lebih lanjut secara tertulis yang akan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI. ■

(60) foto: jakabimr.

Kemenag Diminta Prioritaskan Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam

Komisi VIII mendukung pagu anggaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama, sehingga perencanaan program kerja di lingkungan Kementerian Agama dapat bertitik tolak dari kebutuhan yang mendesak di bidang pembangunan keagamaan.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid, mengatakan Komisi bidang agama ini menginginkan Kemenag memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan Islam.

"Anggaran program kerja tersebut diharapkan dapat berorientasi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang mendesak pada bidang pendidikan Islam," katanya, saat memimpin RDP dengan Dirjen Pendis dan Irjen Kementerian Agama, di gedung DPR RI, Selasa (19/7/2016).

Menurutnya pembahasan

Dewan Apresiasi Langkah Antisipatif Pertamina Jelang Hari Raya Idul Fitri 1437 H

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha apresiasi langkah yang telah dilakukan PT. Pertamina (Persero) dalam mengantisipasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Satya demikian sapaan akrabnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Direktur Utama PT. Pertamina Dwi Soetjipto dipimpin Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Satgas Penyaluran BBM dan LPG Puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H Tahun 2016.

"Saya apresiasi langkah yang telah dilakukan PT. Pertamina (Persero) dalam mengantisipasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah," kata politisi Partai Golkar ini di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/7).

"Suka tidak suka kita tidak mendengar secara massif, complain mengenai jumlah volume. Jadi saya rasa volume yang disediakan terpenuhi. PT. Pertamina telah berusaha semaksimal mungkin dan telah memenuhinya," tambahnya.

Namun ketika berbicara distribusi, Satya menilai ada plus minusnya. Menurutnya

dikuasainya SPBU yang kemudian mengganggu alur distribusi kepada PT. Pertamina menjadi hal yang perlu disikapi dikemudian hari.

Kedepan, ia mengharapkan, untuk mengantisipasi lebaran tidak bisa dijatuhkan pada satu sektor dalam hal ini Pertamina atau Kementerian ESDM saja. Karena menurutnya ada kementerian lain yang mestinya ikut bertanggung jawab.

"Kami tidak melihat fokus perhatian masyarakat pada distribusi BBM yang non Pertamina, ini tenggelam semua. Ini yang musti ditonjolkan,

karena distribusi BBM tidak hanya Pertamina. Kalau dijalur Pantura itu ada AKR yang dominan, ini yang harus diajak menjadi satu kesatuan untuk mengantisipasi permasalahan mudik lebaran yang sangat perlu kerjasama," paparnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Dirut PT. Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menjelaskan bahwa Posko Satgas Pertamina merupakan bagian Satgas yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan Kementerian ESDM, Kepolisian Republik Indonesia dan pihak-pihak terkait. Satgas dimulai dari tanggal 21 Juni sampai dengan 21 Juli 2016

Mengenai ketahanan stok menjelang lebaran dan setelah lebaran, Dwi menyatakan aman. "Kita sudah menambah stok diawal satgas dan ketat kelola serta dipantau di H-7 dan H+12 dan cukup bagus," tegasnya.

Sementara Direktur Pemasaran PT. Pertamina Ahmad Bambang menambahkan, bahwa antisipasi yang telah dilakukan menghadapi arus mudik dan balik antara lain :

Satu, selain SPBU PT. Pertamina menambah *storage* berupa SPBU kantong. Ini adalah mobil tangki yang diisi penuh dan ditaruh dekat SPBU agar *supply*nya tidak jauh. Ada kurang lebih 8 SPBU kantong yang ditambahkan PT. Pertamina.

Kedua, PT. Pertamina berkoordinasi dengan Kepolisian terutama dengan Polda setempat untuk melakukan pengawalan terutama untuk *contra flow*. Ini sudah disiapkan dari awal.

Ketiga, PT. Pertamina menyediakan BBM kemasan yang jumlahnya cukup besar. Kemasan ini terdiri dari 1 liter dan 2 liter untuk sepeda motor, kemudian kemasan 5 liter dan 10 liter khusus untuk mobil. Kemasan BBM ini ditempatkan bukan hanya di jalan tol tetapi juga di jalur Pantura. ■



Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha

dalam rapat ini penting dalam konteks perencanaan dan peningkatan pengelolaan anggaran dari program Kementerian Agama yang transparan efektif dan efisien. Selain itu agar pelaksanaan program bisa berjalan perlu juga pengawasan internal yang baik.

Patut diketahui Rencana Kemenag dalam visi Pendidikan Islam 2015-2019 "Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi".

Pagu anggaran Pendidikan Islam Kemenag 2017 Rp46.016 T (belanja pegawai 50,67%, Operasional Satker 2,61%, dan Tugas dan fungsi 46,72%)

Untuk optimalisasi tugas dan fungsi

Kementerian Agama usul tambahan anggaran 2017 sebesar Rp4.157 T, sehingga total Rp50.173 T. ■



Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjabid

DPR RI Kecam Upaya Kudeta Militer di Turki

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengecam upaya kudeta militer terhadap pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis dan dilindungi oleh konstitusi, yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Binal Yildirim.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasryari dalam rilis yang dikirim kepada Parlemen, Sabtu (16/07). Kharis mengingatkan, agar perwakilan RI melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Turki.

"DPR RI mencermati dan prihatin perkembangan situasi di Turki saat ini. Oleh karena itu, kami berharap dalam situasi yang masih berkecamuk, para perwakilan RI dapat melindungi WNI di Turki yang jumlahnya sekitar 2.700, terutama 800 WNI yang ada di Istanbul dan 400 WNI yang ada di Ankara," tegas Kharis.

Oleh karena itu, politisi F-PKS itu menegaskan seluruh elemen dari negara Indonesia berharap penuh agar kudeta gagal dan situasi di Turki kembali pulih seperti sedia kala.

"Dengan demikian, pemerintah hasil pemilu yang demokratis dalam kepemimpinan Presiden Erdogan dapat terus bekerja," harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Jazuli mengecam tindakan kudeta faksi militer yang jelas mengejutkan dunia serta menohok sendi-sendi demokrasi. Menurut Jazuli, segelintir kelompok militer Turki tersebut telah gegabah dan mengambil jalan pintas untuk merebut kekuasaan melalui kudeta (coup d'etat).

"Kami turut prihatin terhadap upaya kudeta militer di Turki. Kami juga dengan tegas menolak kudeta militer karena itu merupakan gaya kuno yang akan menghadirkan konflik berkepanjangan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat sipil di Turki dan juga kawasan di sekitarnya," tegas Jazuli.

Jazuli menambahkan, bahwa negara Turki modern memiliki sejarah panjang aksi-aksi kudeta. Terakhir terjadi pada tahun 1997, dimana kudeta militer mendepak



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasryari

kekuasaan demokratis yang dipimpin Perdana Menteri Necmettin Erbakan.

"Rakyat Turki yang makin maju dan moderat kian sadar akan makna penguatan demokrasi. Dan di bawah pemerintahan Erdogan demokratisasi kian kokoh hingga empat kali pemilu," imbuh Jazuli.

Oleh karena itu, nilai Jazuli, Turki harus melampaui masa-masa kelamnya, baik krisis ekonomi atau pun bayang-bayang kudeta militer.

"Pemerintahan demokratis hari ini adalah yang menyelamatkannya sejak krisis ekonomi 2001, juga mendapat dukungan 40 persen lebih dalam empat kali Pemilu. Wajar kalau negara-negara sahabat tentu berharap mereka stabil karena juga menguntungkan secara internasional," jelas Jazuli.

Di sisi lain, Jazuli merasa bersyukur saat mendapatkan kabar jika aksi kudeta tersebut dapat digagalkan oleh pemerintah yang sah dan didukung oleh rakyatnya. Oleh karena itu, Jazuli memberikan apresiasi yang besar kepada pemimpin dan elemen-elemen masyarakat di Turki atas keberhasilannya tersebut. Jazuli berharap melalui kejadian ini, demokrasi di Turki kini dan di masa yang akan datang semakin kokoh dan stabil.

"Saya percaya pemerintah Turki sekarang dapat mengatasi masalah dengan membuka lebar kanal komunikasi yang baik dengan berbagai potensi dan kekuatan. Di era demokrasi sekarang ini militer harus

bersatu bersama rakyat dan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan bangsa dan Negara yang kuat bukan terjebak dengan politik praktis," tambahnya.

Politisi asal dapil Banten itu juga mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk ikut proaktif dalam menghadirkan perdamaian dunia bersama dengan bersama masyarakat sipil dalam hal penegakan sendi-sendi demokrasi, sambil memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) tidak terkena masalah di Turki paska kudeta militer yang gagal ini.

Sebelumnya, KBRI Ankara telah mengeluarkan himbuan bernomor 430/C.2/VII/2016 kepada seluruh masyarakat dan WNI di Turki melakukan 3 hal. Pertama, meningkatkan kewaspadaan dan mencermati perkembangan situasi di sekitar. Kedua, sedapat mungkin tetap tinggal di rumah/ tempat tinggal masing-masing serta menghindari pusat keramaian. Ketiga, senantiasa membawa identitas diri (paspor) apabila harus bepergian. Keempat, menjaga komunikasi dengan sesama WNI. Kelima, apabila terjadi suatu hal dapat menghubungi KBRI Ankara atau KBRI Istanbul. ■

(cc) foto: Rizka/mr.



Anggota Komisi VIII DPR RI Amrullah Amri Tuasikal

Perlu Ada Perubahan Revolusioner pada PNRI

Anggota Komisi X DPR RI Dony Ahmad Munir menegaskan, perlu ada perubahan revolusioner pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga perpustakaan betul-betul digemari masyarakat, minat baca meningkat, dan profesi pustakawan menjadi profesi dambaan. Apalagi, dibanding negara lain, minat baca masyarakat masih rendah.

“ Ini menjadi salah satu tugas besar PNRI. Pemerintah dan DPR RI harus peduli untuk memberikan perhatian kepada PNRI, dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran RPJMN 2014-2019. Yakni meningkatkan budaya membaca dan minat membaca masyarakat, serta literasi membaca,” kata Dony saat RDP dengan PNRI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/07).

Dony mencermati, p e l a y a n a n perpustakaan di daerah sangat m i n i m . Perpustakaan harus sosialisasi mengenai fungsinya. Ironisnya, kepala perpustakaan di daerah ditempati oleh 'orang buangan', y a n g

dikhawatirkan ini akan berdampak pada pelayanan perpustakaan.

"Layanan perpustakaan harus lebih baik lagi dari sisi fasilitasnya, koleksi bukunya bisa bertambah dan variatif, termasuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang belum terkoneksi internet. Perpustakaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan program yang bagus dan anggaran yang memadai. Dengan anggaran yang memadai, sehingga target dapat tercapai," imbuh Dony.

Politisi F-PPP itu juga menyarankan perlu banyak tambahan pustakawan dan pengelola pustaka. Pasalnya jumlah pustakawan semakin berkurang, termasuk minat masyarakat untuk masuk ke jurusan Pustaka di perguruan tinggi, juga rendah.

"Ini harus ada upaya yang lebih optimal dari Pemerintah khusus dari PNRI, bagaimana mengatasi minat baca, budaya membaca, sarana, pelayanan, koleksinya, hingga pengelolanya," kata politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara terkait pagu anggaran

RAPBN 2017 PNRI yang mengalami penurunan dibanding APBN 2016, Dony berkomitmen ini menjadi perhatian DPR RI agar dapat meningkatkan anggaran.

"Tapi ketika kita ingin meningkatkan anggaran PNRI prestasi kerja yang dicapai akan seperti apa. Target capaiannya harus jelas. Sehingga masyarakat mendapat dampak positif dari RKAKL PNRI di tahun mendatang," tutup Dony.

Sebelumnya, Kepala PNRI Syarif Bando mengatakan pihaknya pada RAPBN 2017 mendapat anggaran sebesar Rp563 miliar, dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp1.874 triliun, sehingga ada kekurangan anggaran Rp1.310 triliun.

"Sebagaimana paparan pada RDP tanggal 16 Juni 2016 yang lalu, dengan mempertimbangkan tujuan bernegara, fungsi perpustakaan, kerangka berpikir, sasaran strategi, dan target capaian, maka kebutuhan anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp1.874 triliun," kata Syarif.

Selain itu, berdasarkan keputusan RDP tanggal 16 Juni juga, hal ini dalam rangka peningkatan indeks minat baca dan indeks literasi, pelayanan perpustakaan berbasis digital, ekosistem digital, hingga akses layanan baca untuk masyarakat yang tidak terkoneksi dengan internet. Juga dalam rangka diversifikasi layanan perpustakaan, pengembangan bahan pustaka dan penambahan jumlah pustakawan. ■

(as) foto : Akhad/mr.



Anggota Komisi X DPR RI Dony Ahmad Munir

Komisi VIII Dukung Dibangunnya Universitas Islam Internasional Indonesia

DPR RI mendukung Presiden RI Joko Widodo untuk mendirikan Universitas Islam bertaraf Internasional di Indonesia dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Anggota Komisi VIII DPR RI Amrullah Amri Tuasikal mengatakan langkah Presiden Jokowi dalam mendukung didirikannya Universitas Islam Internasional Indonesia perlu mendapat apresiasi.

"Indonesia sebagai negara dengan umat Islam yg luar biasa besar, sudah saatnya memiliki intelektual-intelektual Islam yang tidak hanya mumpuni dalam ilmu

keagamaan namun juga memiliki wawasan global yang luas," kata Amri Tuasikal, usai mengikuti rapat dengar pendapat Komisi VIII dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (20/7/2016).

Politisi Partai Gerindra dapil Maluku ini, mengharapkan semoga ini langkah awal model pendidikan tinggi Islam terkemuka

dalam pengkajian keIslaman yang strategis.

Selanjutnya, sebagai bahan pengawasan oleh Komisi VIII, Kementerian Agama diminta untuk menyampaikan rencana program dan anggaran mengenai pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia tersebut. ■

(as) foto : Krasno/mr.

Komisi II Setujui Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2017

Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2017 sebesar Rp4.105.612.526.000.00. Kesepakatan itu dicapai setelah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (19/07).

“ Namun untuk pengalokasian anggaran berdasarkan program, Komisi II akan membahasnya kembali secara lebih mendalam pada rapat kerja yang akan datang,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman usai memimpin rapat.

Selain itu, terhadap usulan tambahan anggaran Kemendagri sebesar Rp3.539.486.068.000.00 yang akan dialokasikan pada enam program sebesar Rp1.000.000.000.000.00 yang akan didistribusikan sebesar Rp250.000.000.000.00 untuk pusat dan Rp750.000.000.000.00 untuk provinsi/ kabupaten/kota) untuk menjamin keberlangsungan pelayanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia, Komisi II akan membahasnya lebih lanjut pada rapat kerja yang akan datang.

Mengenai usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 yang disampaikan Mendagri terdiri dari DAK Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebesar Rp300.000.000.000.00, DAK Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebesar Rp300.000.000.000.00, DAK Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp500.000.000.000.00, DAK Transportasi Perdesaan sebesar Rp1.566.311.870.000.00, DAK Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp500.000.000.000.00 dan DAK non Fisik untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp34.000.000.000.00

"Mengenai DAK ini, Komisi II akan membahasnya lebih lanjut pada rapat kerja yang akan datang," ujar Rambe.



Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman

Selain itu, Politisi Golkar ini juga menjelaskan Komisi II meminta Kemendagri agar dalam pengalokasian anggaran tahun 2017 juga mengakomodir bantuan dana bagi partai politik. "Termasuk yang belum terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya serta alokasi anggaran untuk pembentukan daerah persiapan," imbuhnya.

Komisi II meminta Kemendagri untuk segera menyampaikan rincian kegiatan dan alokasi anggaran pasca ditetapkannya APBN perubahan tahun 2016. "Hal itu akan dijadikan sebagai materi pendukung dalam pembahasan lanjutan RAPBN tahun 2017," pungkas Rambe. ■

(b.m.p) Foto: Rami/fk

Komisi VIII Berharap Pengurusan Visa Haji Tidak Terlambat

Keterlambatan penerbitan visa haji sering kali menjadi masalah dalam penyelenggaraan haji setiap tahunnya. Pemerintah tidak boleh lagi terlambat mengurus persoalan visa pada penyelenggaraan haji tahun 2016, karena visa merupakan salah satu syarat agar jamaah haji dapat berangkat ke tanah suci.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis, Iskan berharap pemerintah tidak terlambat mengurus persoalan visa pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016.

Oleh karena itu, Iskan menegaskan bahwa Komisi VIII akan terus memastikan Kementerian Agama (Kemenag) mampu mengatur persoalan visa ini tanpa ada permasalahan. Apalagi Komisi VIII telah menyetujui pemberian biaya verifikasi kepada Kemenag, mulai dari tingkat kabupaten kota hingga pusat.

" Untuk biaya pelaksanaan verifikasi sudah disetujui Komisi VIII, dengan adanya suntikan dana itu kami berharap tidak ada permasalahan terkait urusan visa," ungkap Iskan di Jakarta, Selasa (19/7).



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis

Salah satu persoalan utama yang perlu diantisipasi pada pengurusan visa selama ini, jelas Iskan, adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintahan Arab Saudi.

"Jangan sampai ketidaktertiban seperti tahun lalu terjadi lagi. Oleh karena itu perlu evaluasi dalam memperbaiki komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Perlu pula terus memantau tahap demi tahap secara baik, mengingat kewenangan untuk mengeluarkan visa ada di pihak Arab Saudi," tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Dengan demikian, jika terjadi komunikasi dan koordinasi yang lancar dengan Pemerintahan Arab Saudi, maka urusan penerbitan visa akan berjalan cepat dan lancar.

"Apalagi sudah adanya kemudahan dalam pengurusan visa oleh pemerintah Arab Saudi, melalui sistem online," tutup Iskan. ■

(f), foto: Azhar



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf

Perlu Ada *Official Letter* Sebagai Jaminan Dari Pemerintah

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menyatakan perlu ada *Official Letter* dari Pemerintah tentang ada atau tidaknya bahaya sebagai dampak vaksin palsu pada tubuh korban. Hal tersebut disampaikan saat mendengarkan keluhan dan pernyataan sikap dari aliansi orang tua korban vaksin palsu di Gedung DPR RI, Jakarta.

“ Apa yang disampaikan saya pikir memang ada benarnya, bahwa perlu ada *Official Letter*, dari Kementerian Kesehatan, BPOM ataupun Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk mengatakan mengenai bahaya atau tidaknya dampak vaksin palsu terhadap tubuh korban, dan kami akan mintakan hal itu,” tegas Dede saat menerima aliansi orang tua korban vaksin palsu RS Harapan Bunda dan RS. Mutiara Bunda di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/7).

Sejak tahun 2003 sampai tahun 2014 pengawasan itu hanya dilakukan oleh BPOM, dan setelah tahun 2014 keluar Permenkes 85, 35 dan 30, yang mengatakan bahwa Rumah Sakit dan klinik bisa memperoleh obatnya langsung dari pedagang besar farmasi dan distributor. Namun fungsi pengawasannya tidak berjalan, hal ini berarti yang harus bertanggungjawab adalah pemerintah, yakni BPOM,

Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

Ia juga mengutarakan bahwa pertemuan dengan aliansi orang tua korban vaksin palsu ini memang perlu dilakukan, setelah Komisi IX menggali informasi dari pihak pemerintah pada waktu sebelumnya.

"Pada saat kami menemukan informasi ini, kami akan meminta masalah ini untuk dibuka. Meskipun saat itu pemerintah belum bersedia untuk membukanya. Ini adalah sebuah dilema, jika dibuka maka kondisinya akan terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat, tetapi kalau tidak dibuka berarti kita membiarkan hal ini terjadi terus menerus," papar Dede.

Oleh karena itu, lanjut Dede, keputusan kami adalah harus membuka. Dan untuk membuka masalah ini kami juga telah meminta pemerintah untuk mengantisipasi beberapa hal.

"Antisipasi pertama yang kami tanyakan adalah apakah vaksin palsu ini berbahaya atau tidak, harus berdasarkan data dan penelusuran laboratorium. Dan sudah dilakukan oleh Badan POM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan dinyatakan bahwa vaksin ini tidak menjadikan bahaya. Karena isi kandungannya adalah vaksin biasa yang gratis dari pemerintah dicampur dengan cairan insulin. Artinya jika disuntikkan dalam kadar yang sangat kecil 0,01cc, itu tidak menyebabkan bahaya," ujarnya.

Dede juga mengatakan bahwa memang jika sudah ada kasus pasti hal itu akan terkuak. Memang dari sisi bahaya tidak ada, tetapi secara higienis karena pembuatannya tidak secara higienis, mungkin ada bakteri-bakteri.

"Yang kedua, kami meminta langkah apa yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan dan jajarannya, untuk kemudian bisa memberikan rasa aman kepada keluarga dan korban. Anak yang terkena vaksin palsu yang paling rentan adalah dia tidak punya imunitas atau kekebalan. Kami meminta selamatkan dahulu dengan cara memberikan vaksin ulang yang dijamin, yakni vaksin pemerintah," ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

Dede menyarankan agar masyarakat jangan memberikan hukuman kepada institusi yang besar, tetapi sebaiknya mencari oknum. Proses mencari oknum tersebut juga harus melalui lembaga pengadilan.

"Saya meminta dan menghimbau kepada orang tua korban, agar memberi waktu kepada tim baik dari Kepolisian dan pemerintah untuk bekerja. Tetapi kami terus mengawal dan meminta Menteri Kesehatan dan jajarannya melakukan langkah-langkah agar masyarakat merasa aman. Kami akan kawal melalui Panja atau jika diperlukan akan membentuk Pansus," ungkap Dede. ■

JENDELA PARLEMEN



Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pandangan fraksi-fraksi terhadap materi Rancangan UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2015 disaksikan oleh Menteri Keuangan, Rabu (20/7). Foto: Azka,Runi



Komisi I DPR melaksanakan pemilihan calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 berdasarkan suara terbanyak, setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah mufakat, Selasa(19/7). Foto: Rizka



Rapat Kerja Komisi VI DPR bersama tiga Menteri (Keuangan,Perindustrian dan Perdagangan) dipimpin Ketua Komisi Teguh Juwarno perihal RKAKL dalam RAPBN 2017, Rabu (20/7). Foto: Jaka

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

 @dpr_ri  DPR RI  @DPR_RI  DPR RI